



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
UPT. PERPUSTAKAAN

Jalan T. Nyak Arief, Kampus UNSYIAH, Darussalam – Banda Aceh, Tlp. (0651) 8012380, Kode Pos 23111
Home Page : <http://library.unsyiah.ac.id> Email: helpdesk.lib@unsyiah.ac.id

ELECTRONIC THESIS AND DISSERTATION UNSYIAH

TITLE

PROSEDUR PENCAIRAN DANA BELANJA LANGSUNG PADA SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH ACEH

ABSTRACT

RINGKASAN

Laporan Kerja Praktik (LKP) merupakan tugas akhir mahasiswa Diploma III Akuntansi Universitas Syiah Kuala yang telah menyelesaikan praktik kerja lapangan selama dua bulan pada Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Aceh dan telah mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing guna memperoleh gelar ahli madya. Laporan kerja praktik ini telah diselesaikan dengan memperoleh data melalui studi kepustakaan, melakukan wawancara dan observasi di Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Aceh.

Penulisan laporan kerja praktek ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pencairan dana belanja langsung pada Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Aceh setelah mengamati proses pencairan dana belanja langsung yang diterapkan pada sekretariat majelis pendidikan daerah Aceh penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan tersebut adalah sekretariat majelis pendidikan daerah Aceh membutuhkan dana belanja langsung untuk mengutamakan pelaksanaan urusan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas public. Pada sekretariat majelis pendidikan daerah Aceh belanja langsung yang digunakan yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Prosedur dalam pencairan dana belanja langsung yang dilakukan pada sekretariat majelis pendidikan daerah Aceh adalah dengan melakukan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah seperti menerbitkan dan pengajuan surat perintah pembayaran (SPP) dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk disetujui oleh Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) lalu menerbitkan dan pengajuan SPM dilakukan oleh PPTK dan disampaikan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai orang yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran yang menyetujui penerbitan SPM tersebut, SPM yang diterbitkan dan disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran kemudian diajukan kepada Bendahara Umum Aceh (BUA) untuk penerbitan SP2D yang diterbitkan oleh BUA/Dinas Keuangan Aceh (DKA) untuk pencairan belanja langsung.